

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang sama-sama berada di Asia Timur dan memiliki riwayat hubungan yang pasang-surut. Jepang merupakan negara yang pernah menjajah berbagai negara di wilayah Asia sejak abad ke-19 hingga tahun 1945, termasuk Semenanjung Korea yang resmi menjadi koloni Jepang pada tahun 1910 hingga 1945 (Fiandara, 2017). Dua puluh tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1965, Korea Selatan dan Jepang membuat perjanjian yang berisi normalisasi hubungan kedua negara dan secara resmi membuka hubungan diplomatik antara kedua negara. Jepang menganggap dengan adanya perjanjian tersebut, masalah penjajahan dengan Korea Selatan sudah terselesaikan. Namun bagi Korea Selatan, perjanjian tersebut belum bisa menyelesaikan semua masalah terkait isu penjajahan di masa lalu (BBC News, 2019).

Di sisi lain, stabilitas keamanan regional Asia Timur sedang diuji karena Korea Utara beberapa kali menunjukkan aktivitas senjata nuklirnya. Secara geografis, Korea Utara dan Korea Selatan berbagi pulau dan berbatasan langsung, sedangkan geografis Jepang terletak dalam jangkauan rudal menengah milik Korea Utara. Hal ini membuat aktivitas intelijen militer Korea Utara sangat penting bagi kedua negara dan membuat Korea Selatan dan Jepang merasa harus bekerja sama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan regional dan negara masing-masing. Hal ini yang mendasari disetujuinya perjanjian intelijen militer di antara kedua negara.

Negosiasi kerja sama keamanan Seoul dan Tokyo sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2011 dan dijadwalkan ditandatangani pada tahun 2012. Namun penandatanganan perjanjian keamanan yang disebut dengan *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* antara Korea Selatan dan Jepang tersebut gagal dan baru secara resmi ditandatangani pada 23 November 2016. Perjanjian tersebut adalah perjanjian intelijen militer yang memungkinkan

Korea Selatan dan Jepang untuk saling bertukar informasi rahasia mengenai aktivitas militer dan nuklir Korea Utara secara langsung tanpa perantara (Shao, 2019).

Masa berlaku GSOMIA adalah satu tahun dan akan diperbaharui secara otomatis setiap tahun jika tidak ada dari kedua belah pihak yang ingin mengakhiri atau membatalkannya. Pada 22 Agustus 2019, Kantor Kepresidenan Korea Selatan atau yang disebut *Blue House* mengumumkan bahwa Korea Selatan tidak akan melanjutkan GSOMIA. Perwakilan dari Korea Selatan mengemukakan bahwa keberlanjutan GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang tidak sejalan lagi dengan kepentingan nasional Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan penting di dalam hubungan bilateral kedua negara, yaitu Jepang mengumumkan untuk memperketat ekspor bahan kimia utama industri semikonduktor Korea Selatan pada Juli 2019. Menurut Korea Selatan, Jepang melakukan hal tersebut dengan tidak berdasar pada alasan yang jelas dan perpanjangan GSOMIA pada keadaan ini tidak menguntungkan Korea Selatan (KBS World Radio, 2019). Presiden Moon Jae In mengatakan bahwa tindakan Jepang ini merupakan retaliasi perdagangan terhadap keputusan masalah oleh Mahkamah Agung Korea Selatan pada Oktober 2018 yang mengharuskan perusahaan Jepang membayar ganti rugi kepada penggugat yang merupakan pekerja paksa pada masa pendudukan Jepang di Semenanjung Korea (Cheong Wa Dae, 2019). Sedangkan Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa Jepang tidak mencampuradukkan isu sejarah dan isu dagang. Hal-hal tersebut dilakukan karena menurut Jepang, isu bekas buruh Korea saat Perang Dunia II bukan isu sejarah tapi ini tentang kepatuhan Korea Selatan terhadap janji yang dibuat keduanya berdasarkan hukum internasional (VOA, 2019). Di lain kesempatan, Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan bahwa hal-hal tersebut dilakukan Jepang berdasarkan alasan keamanan nasional karena Korea Selatan dikhawatirkan mengembangkan senjata nuklir (Mangkuto, 2019). Kemudian pada awal

Agustus 2019, Jepang menghapus Korea Selatan dari *whitelist*¹ Jepang. Sebagai balasan pada Jepang, Korea Selatan pun menghapus Jepang dari *whitelist* Korea Selatan.

Pada tanggal 22 November 2019 tepatnya pukul 18.00 waktu setempat, Korea Selatan mengumumkan untuk melakukan penundaan bersyarat keputusan negara untuk membatalkan GSOMIA (Kim, 2019). Keputusan negara Korea Selatan yang tiga bulan sebelumnya mengumumkan tidak akan melanjutkan GSOMIA dengan Jepang, namun kemudian mengumumkan akan melanjutkan perjanjian tersebut dalam jarak waktu enam jam sebelum GSOMIA berakhir menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mendasari dan menyebabkan perubahan kebijakan negara tersebut. Sebagai sebuah negara, Korea Selatan memiliki tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan nasional sebagai dasar negara melakukan politik dalam negeri maupun politik luar negerinya. Proses pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara dapat dicermati menggunakan berbagai pendekatan, contohnya model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri William D. Coplin. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis berusaha mengungkapkan alasan keputusan Korea Selatan melanjutkan GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan konsep Kepentingan Nasional yang dihubungkan dengan konsep Politik Luar Negeri, serta model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri yang digagas oleh William D. Coplin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak dijawab pada skripsi ini adalah: ***Mengapa Korea Selatan melanjutkan GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019?***

¹ *Whitelist* atau daftar putih dalam hal ini yaitu daftar mitra dagang favorit atau daftar negara-negara terpercaya dan diberi perlakuan khusus dalam perdagangan.

C. Kerangka Pemikiran

Korea Selatan pada awalnya memberitahu publik akan membatalkan GSOMIA dengan Jepang, akan tetapi kemudian Korea Selatan mengumumkan akan melanjutkan perjanjian tersebut ditambah dengan keputusan tersebut diumumkan hanya dalam kurun waktu enam jam sebelum masa berlaku GSOMIA untuk tahun 2019 habis. Untuk mengetahui alasan kebijakan luar negeri Korea Selatan ini, penulis menggunakan alat bantu analisis berupa Konsep Kepentingan Nasional yang dihubungkan dengan Konsep Politik Luar Negeri, serta Model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin.

1. Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Politik Luar Negeri

Menurut Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional didefinisikan sebagai “kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.” (Morgenthau, 1951). Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional (*national interest*) adalah elemen-elemen fundamental yang menjadi pedoman para aktor pengambil keputusan dalam suatu negara yang ditujukan ke negara lain. Elemen-elemen ini mencakup kedaulatan (*sovereignty*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*) (Putra, 2011).

Suatu negara harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan tersebut disebut juga kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan suatu negara pada bidang politik dan keamanan, baik dalam berhubungan dengan negara lain maupun dengan aktor non-negara. Kebijakan politik luar negeri mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan strategi untuk mencapai tujuan suatu negara (Ashari,

2015). Dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, William D. Coplin mengemukakan tiga karakter keputusan (Surwandono, 2015). Ketiga karakter keputusan tersebut adalah:

- a. Keputusan yang bersifat general. Keputusan ini adalah keputusan fundamental suatu negara yang menjadi dasar atau pedoman bagi kebijakan-kebijakan luar negeri lain negara tersebut. Karena merupakan keputusan fundamental, pembuatan keputusan tersebut pun harus dilakukan melalui kajian mendalam, jangkauan data yang maksimal, dan melibatkan banyak pihak. Maka dari itu yang berperan adalah eksekutif tingkat tinggi yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, dan yang berkedudukan setara. Dalam bidang diplomasi ditemukan *summit diplomacy*, yaitu bentuk negosiasi antar kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menyelesaikan isu-isu yang menyangkut masyarakat internasional.
- b. Keputusan yang bersifat administratif. Keputusan ini adalah keputusan yang dijalankan sehari-hari oleh negara sebagai aktor internasional, sehingga disebut juga keputusan yang bersifat operasional. Dalam pelaksanaannya, proses penerapan keputusan general menjadi administratif wajarnya sudah dibuat *standar operating procedure (SOP)*-nya.
- c. Keputusan yang bersifat krisis. Menurut D. Coplin, keputusan ini ditandai dengan: terbatasnya data dan waktu yang tersedia, terancamnya kepentingan negara, dan dalam batas tertentu memiliki dimensi jangka pendek. Melalui tanda-tanda tersebut terlihat bahwa aktor pengambil keputusan didorong untuk merespon suatu

fenomena internasional dengan segera, tanpa wajib melibatkan banyak pihak bahkan data.

Dalam proses pembuatan keputusan, apapun keadaannya, para aktor pengambil kebijakan pasti dihadapkan dengan beberapa pilihan alternatif kebijakan. Berbagai alternatif tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara tuntas melalui proses-proses intelektual dan penalaran agar dihasilkan suatu keputusan yang rasional. Tindakan yang rasional didefinisikan oleh Robert Dahl dan Charles Lindblom sebagai suatu tindakan yang dapat secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, yang berdasar pada pertimbangan tentang tujuan tersebut dengan kenyataan dunia tempat tindakan itu dilakukan (Mas'ood, 1990, hal. 323). Rasionalitas ini terutama dengan mempertimbangkan untung dan rugi (*cost and benefit*) pada masing-masing alternatif pilihan. Pada umumnya alternatif-alternatif tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu pilihan yang paling ideal, pilihan yang biasa saja atau cenderung hampir sama antara untung dan ruginya, serta pilihan yang penuh dengan resiko. Kemudian dengan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil” dipilihlah satu pilihan yang paling tepat dan efisien (Mas'ood, 1990, hal. 276).

Menurut konsep kepentingan nasional di atas, Korea Selatan berkepentingan untuk menjaga stabilitas negaranya, baik stabilitas ekonomi maupun keamanan negara. Di bidang ekonomi, penghapusan Korea Selatan dari *whitelist* Jepang berdampak langsung bagi perekonomian Korea Selatan. Hal ini karena Korea Selatan bergantung pada ekspor, sedangkan bahan baku komoditi ekspor mereka yang selama ini berasal dari Jepang dibatasi untuk masuk ke Korea Selatan sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi komoditi ekspor Korea Selatan.

Sedangkan di bidang keamanan militer, Korea Selatan berkepentingan bukan hanya untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya namun juga stabilitas keamanan regional Asia Timur. Hal ini karena jika stabilitas keamanan Asia Timur terguncang, hal tersebut dapat berakibat pada stabilitas keamanan Korea Selatan. Seiring waktu berjalan menuju berakhirnya masa berlaku tahunan GSOMIA pada 23 November, Korea Selatan semakin dihadapkan dengan pilihan-pilihan tindakan mana yang bisa diambil atau tidak akan diambil sekaligus dengan kemungkinan-kemungkinan akibat yang dihasilkannya. Dengan segala pertimbangan, Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk tetap melanjutkan GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019. Keputusan ini diambil melalui analisis dan pertimbangan yang mendalam, mempertimbangkan pilihan mana yang memiliki resiko terkecil dan keuntungan terbesar bagi Korea Selatan di antara alternatif-alternatif yang bisa dikatakan tidak akan lagi bisa memberikan keuntungan yang besar bagi Korea Selatan mengingat Korea Selatan yang sebelumnya sudah mengumumkan tidak akan melanjutkan GSOMIA dengan Jepang.

2. Model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin

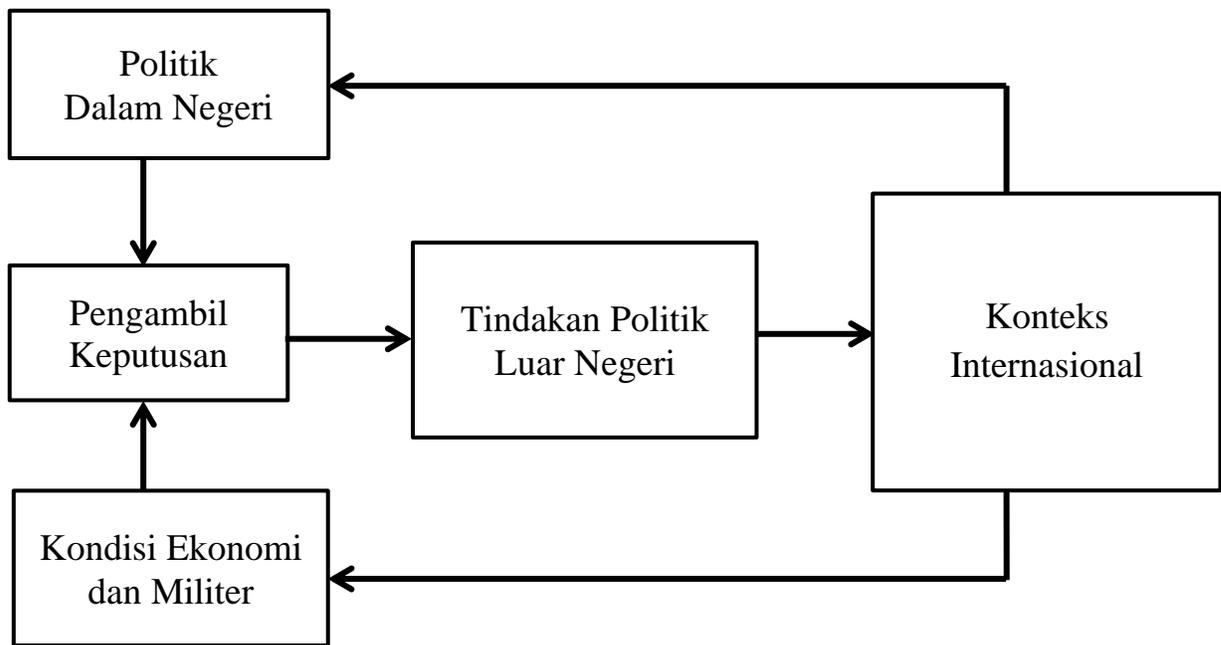
Dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri, pastinya terdapat aktor-aktor pengambil keputusan yaitu mereka yang secara resmi bertanggung jawab dan sedang dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu sehingga membuat mereka tidak ada pilihan lain selain membuat keputusan kebijakan luar negeri, atau mereka yang memiliki pengaruh secara nyata dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negaranya dalam ranah internasional (Coplin, 1974).

William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*:

“To be interested in why states behave as they do in the international arena, we have to be interested in why their leaders make the decisions they make.” (Coplin, 1974)

Meskipun kita harus menaruh perhatian pada alasan para pemimpin negara membuat keputusan yang mereka telah buat tersebut untuk bisa membahas alasan suatu negara berperilaku tertentu di ranah internasional, bukan berarti pengambil keputusan kebijakan luar negeri bertindak dalam ruang hampa tanpa adanya faktor yang menentukan. Justru sebaliknya, setiap tindakan kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori besar pertimbangan yang mempengaruhi pembuat keputusan kebijakan luar negeri untuk membuat keputusan tersebut. Pertama adalah politik domestik dalam negeri pembuat keputusan kebijakan luar negeri; kedua yaitu kemampuan atau keadaan ekonomi dan militer dalam negeri; dan ketiga adalah konteks internasional yang merupakan hasil dari kebijakan luar negeri seluruh negara lain, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan; yang mungkin atau diantisipasi (Coplin, 1974).

Berikut skema interaksi determinan-determinan yang telah disebutkan sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan luar negeri:



Gambar 1. 1 Skema Teori Kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin

Sumber: William D. Coplin, *Introduction to international politics: a theoretical overview*, (edisi kedua, tahun 1974) hal. 29

a. Kondisi Politik dalam Negeri

Determinan pertama dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri adalah kondisi politik domestik dalam negeri pembuat keputusan. Kondisi politik dalam negeri setiap negara yang berbeda, termasuk sistem pemerintahan, perbedaan terbuka atau tertutupnya sistem politik², dan stabilitas negara, menjadi poin penting pertimbangan suatu negara untuk membuat keputusan. (Coplin, 1974, hal. 156).

Menurut Coplin, determinan ini berfokus pada hubungan para pengambil keputusan kebijakan luar negeri (*foreign policy decision makers*) dengan para aktor politik domestik (*policy influencers*) yang berusaha memberikan pengaruh dalam proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Hubungan ini disebut *policy influencer system*. *Policy influencer system* terjadi secara timbal balik, yaitu para pengambil keputusan membutuhkan

² Istilah sistem politik terbuka digunakan sebagai sinonim dari sistem politik demokrasi konstitusional. Sedangkan istilah sistem politik tertutup mengacu pada sistem politik yang sebaliknya atau sistem politik autokrasi. Klasifikasi terbuka atau tertutupnya sistem politik negara dipandang sebagai sesuatu yang kontinum.

policy influencers untuk sumber dukungan atau sumber daya dalam pelaksanaan kebijakannya dan untuk membuat posisi jabatannya lebih pasti. Dukungan yang dimaksud berupa dukungan loyalitas angkatan bersenjata, finansial dari para pengusaha, suara rakyat dalam pemilu, maupun keengganan rakyat untuk melawan pemerintah. Di lain sisi, *policy influencers* membutuhkan para aktor pembuat kebijakan agar tuntutan-tuntutan yang mereka buat dapat terkabul menjadi sebuah kebijakan. Tentu para pembuat kebijakan tidak harus selalu mengabdikan semua tuntutan *policy influencers*, tetapi para pembuat kebijakan juga memiliki batasan sejauh mana mereka dapat mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. Hal ini karena jika *policy influencers* tidak terpuaskan akan tuntutan-tuntutannya, maka dukungan kepada para pembuat kebijakan akan berkurang sebagian atau seluruhnya. Maka dari itu, bagaimanapun para pembuat kebijakan harus memenuhi setidaknya tuntutan minimal (*minimal demands*) karena tuntutan dan dukungan tidak selalu seimbang (Coplin, 1974, hal. 69).

Coplin membagi jenis *policy influencers* menjadi empat:

1. *Bureaucratic influencers*, yaitu berbagai individu dan organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil kebijakan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Kelompok ini merupakan kelompok yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan karena anggota birokrasi di sini terkadang juga merupakan aktor pembuatan keputusan luar negeri. Selain itu juga karena mereka merupakan sumber informasi penting sekaligus juga membantu langsung dalam pelaksanaan keputusan yang telah dibuat sehingga anggota birokrasi berinteraksi langsung dengan pembuat keputusan (Coplin, 1974, hal. 75).
2. *Partisan influencers*, yaitu partai politik yang memiliki tujuan untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan kepada pembuat kebijakan yang berkenaan

dengan kebijakan pemerintah (tuntutan politik). *Partisan influencer* mempengaruhi pembuat keputusan dengan cara menekan pihak-pihak yang berkuasa dan menyediakan kader-kader untuk masuk menjadi pembuat kebijakan (Coplin, 1974, hal. 76).

3. *Interest influencers*, yaitu kelompok individu yang mempunyai kepentingan yang sama. Meskipun belum cukup untuk menjadikan kelompok ini sebagai partai politik, kepentingan tersebut sangat berkepentingan untuk mendapatkan dukungan dari pembuat kebijakan dan *policy influencer* lainnya. *Interest influencers* mempengaruhi pembuat keputusan dengan cara melakukan kampanye, menulis surat pada pembuat kebijakan dan *policy influencer* lainnya, memberikan maupun menarik bantuan finansial, dan lain lain. Mereka berusaha mempengaruhi pembuat kebijakan baik secara diam-diam dibalik layar maupun secara terbuka (Coplin, 1974, hal. 78-79).
4. *Mass influencers* atau opini publik sangat penting terutama bagi negara dengan sistem politik terbuka karena berperan dalam proses elektoral. Namun bukan berarti para pembuat kebijakan dikendalikan oleh *mass influencers*. Para pembuat kebijakan menggunakan opini publik sebagai kekuatan yang mengarahkan pembuat keputusan kebijakan luar negeri untuk merasionalisasi tindakan kebijakan luar negeri, bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri. Jika *mass influencers* ini merupakan *policy influencer* utama di dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan media massa adalah pihak yang paling penting. Hal ini karena media massa menyediakan berita bagi para pembuat kebijakan. Meski sulit mengidentifikasi bagaimana berita dari media massa dapat mempengaruhi pemikiran para pembuat kebijakan, satu hal yang pasti adalah berita tersebut telah menjadi bagian dari persepsi dalam pemikiran para pembuat kebijakan (Coplin, 1974, hal. 80-82).

Semua jenis *policy influencers* di atas tidak selalu memiliki pandangan yang sama, terutama terhadap suatu kebijakan. Begitu pula dengan para pengambil keputusan. Terkait GSOMIA Korea Selatan dan Jepang, *mass influencers* merupakan *policy influencer* yang memiliki pengaruh paling besar. Hal ini bisa dilihat dari gagalnya penandatanganan GSOMIA pada tahun 2012 yang merupakan akibat adanya tentangan dari rakyat Korea Selatan yang anti-Jepang akibat luka kolonisasi di masa lalu. Pada tahun 2019, publik Korea Selatan masih terbelah menjadi dua kubu: pro dan kontra terhadap kerja sama keamanan dengan Jepang ini. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survei salah satu lembaga survei di Korea Selatan pada 18 November 2019 bahwa mayoritas responden berpendapat untuk tetap mencabut GSOMIA. Namun kali ini pemerintahan Presiden Moon Jae In memiliki pandangan bahwa kepentingan nasional Korea Selatan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negaranya, serta stabilitas keamanan Asia Timur lebih penting sehingga memutuskan untuk tetap melanjutkan GSOMIA. Hal ini menunjukkan keputusan tetap ada pada para aktor pembuat kebijakan yang sudah secara matang mempertimbangkan segala kemungkinan.

b. Kondisi Militer dan Ekonomi dalam Negeri

Determinan ini memberikan gambaran sejauh mana atau sebesar apa kemampuan dan keterbatasan ekonomi dan militer suatu negara untuk melaksanakan sebuah politik luar negeri. Sebuah negara harus memiliki komitmen dan kemampuan untuk menciptakan kapabilitas ekonomi dan militer yang dibutuhkan sebagai dukungan untuk kebijakan luar negerinya (Coplin, 1974, hal. 156). Selain bisa memberi dukungan untuk kebijakan luar negerinya, bidang ekonomi dan militer suatu negara juga dapat memberikan tuntutan pada para pembuat kebijakan. Oleh sebab itu, setiap negara perlu memperhatikan faktor ini saat membuat kebijakan luar negeri agar dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa suatu negara tidak bisa hanya fokus pada peningkatan perekonomiannya tetapi juga harus fokus dalam peningkatan kapasitas militernya, terutama terkait keamanan nasional dan regional. Dalam hal ini, Korea Selatan tidak hanya sadar bahwa kondisi ekonominya akan melemah karena suplai bahan dasar yang digunakan dalam industri teknologi mereka dari Jepang dibatasi, namun juga sadar akan kekurangannya dalam mengumpulkan informasi militer terkait dengan aktivitas senjata nuklir Korea Utara. Dengan adanya GSOMIA, Korea Selatan dan Jepang dapat bertukar informasi tentang aktivitas nuklir Korea Utara dan dapat menggenapi kekurangan informasi satu sama lain. Informasi yang didapat pun dapat digunakan menjadi data negara masing-masing untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukan Korea Utara selanjutnya serta untuk memperhitungkan respon seperti apa yang tepat dilakukan ketika terjadi aktivitas militer tidak wajar Korea Utara. Hal ini membuat Korea Selatan memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan Jepang.

c. Konteks Internasional

Determinan yang terakhir adalah faktor konteks internasional. Konteks internasional yang dimaksud adalah situasi yang sedang terjadi di sistem internasional yang meliputi faktor geografis, ekonomi, dan politik. Letak geografis suatu negara sangat penting karena berkaitan langsung dengan apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional. Letak tertentu suatu negara berhubungan dengan negara lain dalam sistem dan hubungan mereka di bidang ekonomi dan politik dengan kata lain, letak suatu negara mempengaruhi pola interaksinya dengan negara lain, khususnya negara tetangga seperti pola perdagangan, pola aliansi, keanggotaan dalam organisasi antar pemerintah, dan lain-lain. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah adanya arus barang, jasa, dan modal yang membuat interdependensi ekonomi sebuah negara dengan negara lainnya yang akan menciptakan dukungan maupun

tuntutan pada aktor pengambil keputusan kebijakan luar negeri. Kemudian faktor politik yang dimaksud yaitu seperti aliansi dan adanya rasa memiliki kepentingan bersama adalah bagian penting dari konteks internasional negara (Coplin, 1974, hal. 169-170).

Letak geografis Korea Selatan adalah berbagi pulau dan berbatasan langsung dengan Korea Utara. Jika Korea Utara melakukan pengujian nuklir atau melakukan aktivitas berbahaya lainnya, hal ini akan langsung terasa di Korea Selatan dan dapat mengganggu stabilitas Korea Selatan. Selain itu, di bidang ekonomi, Korea Selatan masih bergantung pada Jepang terkait suplai bahan dasar untuk industri teknologi mereka. Apalagi setelah adanya penghapusan Korea Selatan dari *whitelist* Jepang, Korea Selatan lebih memantapkan keputusan apakah harus membatalkan GSOMIA atau tetap melanjutkannya. Sedangkan dari sisi politik, Amerika Serikat yang merupakan sekutu Korea Selatan dan Jepang mendorong kedua negara sekutu utamanya di Asia Timur Laut tersebut agar dapat berdamai dan dapat melanjutkan GSOMIA lagi. Hal ini mempengaruhi Korea Selatan untuk menyetujui keberlanjutan GSOMIA.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran penulis yang sudah dikemukakan sebelumnya, penulis memandang bahwa alasan Korea Selatan mengambil keputusan untuk melanjutkan GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019 karena Korea Selatan membutuhkan Jepang untuk bekerja sama menjaga stabilitas keamanan nasional negaranya dan regional Asia Timur; Korea Selatan tidak ingin lebih dirugikan lagi terutama dalam bidang industri teknologinya yang akan berimbas ke perekonomian negaranya; dan adanya dorongan untuk menjaga hubungan trilateralnya bersama Jepang dan Amerika Serikat.

E. Jangkauan Penelitian

Adanya jangkauan penelitian berguna untuk membatasi pembahasan suatu tulisan agar fokus dan tidak melebar merambah ke pembahasan yang lebih luas. Maka dari itu, tulisan ini akan berfokus pada dinamika pasang-surut hubungan Korea Selatan dan Jepang terutama pada tahun 2016-2019. Beberapa peristiwa penting dalam riwayat hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang tahun 2010-2019 yang berhubungan atau mempengaruhi topik pembahasan juga akan disinggung, dengan alasan:

- a. Pada tahun 2010 terjadi serangan artileri ke Pulau Yeonpyeong, Korea Selatan oleh Korea Utara, kemudian diadakan perundingan perjanjian keamanan trilateral Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.
- b. Pada tahun 2012, GSOMIA gagal ditandatangani Korea Selatan dan Jepang karena adanya protes dan tentangan dari warga Korea Selatan yang antipati terhadap Jepang.
- c. Pada tahun 2016, GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang ditandatangani.
- d. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan untuk perusahaan Jepang agar membayar ganti rugi kepada penggugat yang merupakan pekerja paksa masa pendudukan Jepang. Selain itu, tahun 2018 ini Presiden Moon Jae In membubarkan Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan³.
- e. Pada tahun 2019 terjadi eskalasi ketegangan Korea Selatan dan Jepang yang memicu Perang Dagang antara Korea Selatan dan Jepang dan puncaknya ketika Korea Selatan ingin membatalkan GSOMIA pada 22 Agustus 2019, namun membatalkan keputusan tersebut pada 22 November 2019.

³ Yayasan yang diperuntukkan bagi para wanita korban perbudakan syahwat (*Jugun Ianfu*) tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang di Semenanjung Korea.

F. Metodologi

Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang *Alasan Korea Selatan Melanjutkan GSOMIA dengan Jepang Pada Tahun 2019* melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari buku, berita, jurnal, artikel, laporan, website internet, dan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis (Purwoko, 2017). Data yang diperoleh dari studi kepustakaan disebut data sekunder atau *secondary data*.

Analisis data sekunder adalah analisis yang menggunakan data yang sudah matang dan sudah dipublikasikan dan didapat dari instansi atau lembaga tertentu. Analisis data sekunder berbeda dengan analisis isi, yaitu pada analisis isi peneliti memanfaatkan data berupa simbol-simbol atau teks dari berbagai sumber kemudian peneliti tersebutlah yang mengolah data sehingga data tersebut menjadi mempunyai arti (Shofa, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini terstruktur dan koheren antar bagiannya, berikut sistematika penulisan hasil penelitian ini:

Bab I Pendahuluan : Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metodologi, hipotesis, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II Pembahasan : Pada bab ini akan berisi analisis mengenai alasan Korea Selatan melanjutkan GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2019 yang didahului dengan bahasan mengenai hubungan fluktuatif Korea Selatan dan Jepang serta penjelasan mengenai GSOMIA. Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah dan menguraikan pembuktian dari hipotesis berdasarkan data dan fakta.

Bab III Kesimpulan : Berisi kesimpulan yang didapat dari penjelasan Bab I dan Bab II serta saran untuk tulisan-tulisan berikutnya.